



Kesantunan Berbahasa Warganet dalam Menanggapi Usulan Gentengisasi pada Postingan Instagram Folkative

Esa Futuh Handa¹, Mohammad Sofwan Azizi², Syafa Rahmadani³, Dariel Ramadhan Sahari⁴, Ahe Fauzi⁵, Cicha Kartikha Sri Mulyani⁶, Asep Purwo Yudi Utomo^{7*}, Alien Kurnia Warya Selia⁸

¹⁻⁶Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

⁷ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

⁸Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

Email: esafutuhanda@students.unnes.ac.id¹, roppol1782@students.unnes.ac.id², syafarahmadani38@students.unnes.ac.id³, darielsahari@students.unnes.ac.id⁴, fausipendidikan@students.unnes.ac.id⁵, cichakartikhaa1313@students.unnes.ac.id⁶, asepppyu@mail.unnes.ac.id⁷, alinkurnia15@borneo.ac.id⁸

*Penulis Korespondensi: asepppyu@mail.unnes.ac.id

Abstract. *This research arose from the growth of social media as an online public platform that influences communication methods, including netizens' politeness. The purpose of this study is to explain the types of illocutionary speech acts and analyze compliance and violations of politeness principles in netizens' responses to the proposed gentengization in Folkative's Instagram post. The method used was descriptive qualitative with a pragmatic approach. Data was collected through a listening and note-taking technique on the top 100–160 comments, then analyzed using the distribution method based on John Searle's speech act theory and Geoffrey Leech's politeness principles. The research findings indicate that netizens employed various speech acts, such as representative, directive, expressive, and commissive. In terms of politeness, compliance and violations were identified, with the most frequent violations occurring in the maxims of appreciation and agreement. This suggests that interactions on social media tend to be more expressive and less organized. This research contributes to enriching the study of digital pragmatics and raising public awareness of polite communication in online public spaces.*

Keywords: *Netizens; Politeness; Pragmatics; Social Media; Speech Acts.*

Abstrak. Penelitian ini muncul akibat pertumbuhan media sosial sebagai platform publik daring yang memengaruhi cara berkomunikasi, termasuk kesopanan berbahasa netizen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan jenis-jenis tindak tutur ilokusi serta menganalisis kepatuhan dan pelanggaran prinsip kesopanan dalam tanggapan netizen terhadap usulan gentengisasi di unggahan Instagram Folkative. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik simak dan catat terhadap 100–160 komentar teratas, kemudian dianalisis dengan metode agih berdasarkan teori tindak tutur karya John Searle dan prinsip kesopanan dari Geoffrey Leech. Temuan penelitian menunjukkan bahwa netizen mengaplikasikan berbagai macam tindak tutur, seperti representatif, direktif, ekspresif, dan komisif. Dalam hal kesopanan, teridentifikasi adanya kepatuhan dan pelanggaran, dengan pelanggaran yang paling banyak terjadi pada maksim penghargaan dan kemufakatan. Ini menunjukkan bahwa interaksi di media sosial cenderung lebih ekspresif dan kurang teratur. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkaya kajian pragmatik digital serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai komunikasi yang santun di ruang publik daring.

Kata Kunci: Kesantunan Berbahasa; Media Sosial; Netizen; Pragmatik; Tindak Tutur.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan media sosial pada era digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara fundamental. Platform digital tidak hanya menjadi sarana berbagai informasi, tetapi juga sebagai ruang diskursif tempat opini, kritik, dukungan, bahkan konflik diproduksi dan direproduksi secara masif. Sebagaimana ditegaskan oleh Puspitasari et al. (2024) media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, melainkan juga sebagai ruang interaksi yang melahirkan berbagai tindak tutur ilokusi yang memicu respons beragam dari warganet, sehingga memperlihatkan bahwa platform digital merupakan arena diskursif tempat opini, kritik, dukungan, dan konflik diproduksi serta direproduksi secara

Naskah Masuk: 20 Mei 2026; Revisi: 26 Juni 2026; Diterima: 01 Juli 2026; Terbit: 07 Juli 2026

masif. Dalam konteks ini, setiap ujaran yang dipublikasikan tidak lagi bersifat personal atau terbatas, melainkan berpotensi menjangkau audiens yang sangat luas dan heterogen. Karakter media sosial yang terbuka serta kemudahan distribusi konten menjadikannya bahasa sebagai instrumen utama pembentuk opini publik. Menurut Abror & Sukmawati, (2025) jejak digital yang relatif permanen semakin memperkuat urgensi kesantunan berbahasa. Oleh sebab itu, kesadaran dalam memilih kata, menyusun kalimat, dan mempertimbangkan dampak tuturan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Ujaran yang telah dipublikasikan sulit untuk sepenuhnya dihapus dan dapat kembali muncul dalam konteks yang berbeda. Sejalan dengan itu, menurut menunjukkan bahwa bahasa di ruang digital memiliki konsekuensi jangka panjang.

Bahasa merupakan instrumen komunikasi fundamental manusia yang berfungsi sebagai penghubung interaksi, baik secara lahiriah maupun batiniah. Sejalan dengan itu, Pratama & Utomo, (2020) mengatakan bahwa bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia agar dapat berhubungan dengan sesama baik secara lahir maupun hingga batin. dengan demikian dalam kenyataannya, bahasa merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Dalam proses berbahasa manusia akan menghasilkan sebuah tuturan. Tuturan ini merupakan fungsi sebagai sarana penindak. Hal ini berkaitan dengan bahasa atau tuturan seseorang yang mengandung suatu maksud atau makna karena seseorang tidak semata-mata bertutur atau asal bicara. Sebagai sistem simbolik yang terorganisasi, bahasa memungkinkan manusia membangun komunikasi melalui satuan bunyi, kata, frasa, hingga wacana yang bermakna. Melalui bahasa, individu tidak hanya menyampaikan informasi secara faktual, tetapi juga membentuk relasi sosial, menegaskan identitas, serta merepresentasikan realitas di sekitarnya. Dalam konteks ini, bahasa menjadi medium utama yang menjembatani pikiran dan perasaan seseorang dengan dunia sosialnya, sehingga komunikasi tidak berhenti pada pertukaran pesan, melainkan berlanjut pada pembentukan makna bersama. Menurut Kadam et al. (2024) bahasa memiliki fungsi utama sebagai sarana komunikasi.

Dalam kehidupan manusia, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Sejalan dengan itu Hastuti et al. (2024) menjelaskan bahwa melalui bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, serta menyampaikan maksud dan tujuan tertentu kepada orang lain dengan jelas. Dalam kerangka sosial, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang mereproduksi dan meneguhkan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan itu, Hanim et al. (2024) menjelaskan bahwa bahasa secara efektif berperan sebagai instrumen pengendalian sosial. Cakupan pengendalian ini tidak hanya terbatas pada regulasi diri individu, tetapi juga meluas ke lingkungan masyarakat,

sehingga setiap praktik berbahasa membawa konsekuensi sosial karena pilihan kata, intonasi, serta strategi penyampaian mencerminkan relasi kekuasaan, jarak sosial, dan nilai budaya yang dianut oleh penutur maupun mitra tutur. Sejalan dengan itu Damayanti et al. (2025) menjelaskan bahwa bahasa berfungsi sebagai sarana kekuasaan dan dominasi sosial. Melalui bahasa, seseorang dapat menunjukkan penghormatan, solidaritas, dominasi, bahkan resistensi. Oleh sebab itu, praktik berbahasa senantiasa berada dalam ruang sosial yang sarat dengan aturan dan ekspektasi kolektif.

Melalui hal tersebut, bahasa sebagai alat komunikasi berkaitan erat dengan kajian pragmatik. Kajian pragmatik adalah salah satu cabang linguistik yang secara khusus mempelajari tentang maksud dari sebuah tuturan melampaui makna harfiahnya (Kandam et al., 2024). Dalam kajian ini, fokus utama bukan hanya pada struktur bahasa (seperti tata bahasa atau pilihan kata), melainkan pada bagaimana konteks situasi memengaruhi cara penutur menyampaikan pesan dan bagaimana pendengar menafsirkan pesan tersebut. Dengan kata lain, pragmatik mengkaji hubungan antara bahasa dan konteks yang menjadi dasar bagi penjelasan tentang pemahaman bahasa, sehingga maksud yang ingin disampaikan oleh penutur dapat diterima dengan tepat oleh lawan bicara. Kegiatan inilah yang disebut tindak tutur. Tindak tutur ialah tindakan yang diperlihatkan melalui kata-kata (Wulandari & Utomo, 2021). Artinya, ketika seseorang berbicara, ia tidak sekadar merangkai bunyi atau menyusun kalimat, tetapi sekaligus melakukan suatu tindakan tertentu melalui ujarannya.

Berangkat dari pemahaman bahwa setiap tuturan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga merealisasikan tindakan tertentu, analisis pragmatik tidak dapat dilepaskan dari dimensi interpersonal dalam komunikasi. Menurut Hidayah (2024) menekankan bahwa pemahaman yang mendalam tentang nuansa komunikasi interpersonal sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan hubungan antar individu. Dengan demikian setiap tindak tutur berpotensi memengaruhi hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur, baik dengan mempererat relasi maupun menimbulkan ketegangan. Oleh karena itu, selain menelaah jenis dan fungsi tindak tutur, kajian pragmatik juga perlu mempertimbangkan bagaimana tindakan berbahasa tersebut dikelola agar tetap berada dalam koridor yang dapat diterima secara sosial. Dalam titik inilah konsep kesantunan berbahasa menjadi relevan, karena kesantunan berfungsi sebagai mekanisme pengatur agar tindakan yang diwujudkan melalui bahasa tidak merusak keseimbangan relasi interpersonal.

Kesantunan berbahasa pada dasarnya merupakan upaya untuk menjaga “muka” atau harga diri seseorang dalam proses komunikasi. Konsep ini dijelaskan secara sistematis oleh Penelope Brown dan Stephen C. Levinson melalui teori kesantunan yang menekankan

pentingnya perlindungan citra diri penutur maupun mitra tutur. Menurut keduanya, setiap individu memiliki kebutuhan akan penghargaan diri yang disebut *face*, yang terbagi menjadi dua dimensi, yakni muka positif dan muka negatif. Muka positif berkaitan dengan kebutuhan seseorang untuk diterima, dihargai, dan diakui keberadaannya dalam interaksi sosial. Dalam konteks ini, strategi kesantunan diwujudkan melalui ungkapan persetujuan, pujian, solidaritas, atau empati yang bertujuan mempererat hubungan interpersonal. Sebaliknya, muka negatif merujuk pada kebutuhan individu untuk mempertahankan otonomi dan kebebasan bertindak tanpa tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu, dalam situasi yang berpotensi membatasi kebebasan mitra tutur, penutur cenderung menggunakan bentuk-bentuk tidak langsung, seperti permohonan, penghalusan, atau penambahan penanda kesopanan agar tidak menimbulkan kesan memaksa. Pemahaman terhadap kedua aspek muka tersebut menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik komunikasi di ruang publik, termasuk di media sosial. Pemahaman terhadap kedua aspek muka tersebut menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik komunikasi di ruang publik, termasuk di media sosial (Yulianti & Utomo, 2020). Menurut Salsabila & Anshori, (2025) menjelaskan bahwa platform digital telah menciptakan ruang untuk dialog antar budaya dan pertukaran ide, mempromosikan pemahaman dan toleransi di antara individu dengan latar belakang yang berbeda, oleh karena itu interaksi digital sering kali mempertemukan individu dengan latar belakang, kepentingan, dan perspektif yang berbeda, sehingga potensi terjadinya *face-threatening acts* semakin besar. Dalam konteks inilah, strategi kesantunan menjadi variabel krusial untuk menilai bagaimana warganet membangun, mempertahankan, atau justru mengancam citra diri pihak lain melalui tuturan yang mereka produksi.

Alasan pemilihan judul "Kesantunan Berbahasa Warganet dalam Menanggapi Usulan Gentengisasi pada Postingan Instagram Folkative" didasarkan pada keunikan konteks pragmatik yang terkandung di dalamnya. Pertama, istilah "gentengisasi" merujuk pada kebijakan yang lebih bersifat tampilan atau estetika, bukan menyentuh langsung persoalan ekonomi atau hukum. Karena itu, secara pragmatik, respons warganet terhadap isu ini cenderung berbeda. Reaksi yang muncul biasanya lebih berupa komentar bernada sindiran, opini personal, atau perdebatan soal prioritas kebijakan, bukan argumentasi teknis seperti yang sering ditemukan pada isu ekonomi atau hukum. Seperti pada Wijayanti & Subekti (2018) yang membahas kesantunan berbahasa pada persoalan hukum dengan judul "Kesantunan Berbahasa pada Judul Berita Kasus Korupsi di Media Sosial." Kedua, penggunaan akun Instagram Folkative sebagai sumber data dipilih karena akun ini merupakan representasi media alternatif dengan basis pengikut (audiens) mayoritas Generasi Z dan Milenial. Pola komunikasi pada

akun ini memiliki karakteristik sosiolinguistik yang khas, seperti penggunaan bahasa campur kode (*code-mixing*), metafora, dan sarkasme, yang menjadi tantangan menarik jika dibedah menggunakan teori kesantunan klasik.

Penelitian ini krusial untuk dilakukan karena adanya pergeseran standar kesantunan di era digital. Dalam perspektif pragmatik, kesantunan bukan sekadar masalah penggunaan kata-kata halus, melainkan tentang bagaimana strategi "penyelamatan muka" (*face-saving acts*) dilakukan dalam sebuah tuturan. Di media sosial, batas antara kritik yang membangun dan penghinaan menjadi sangat tipis. Meneliti respons warganet terhadap isu gentengisasi memungkinkan kita untuk melihat bagaimana masyarakat digital menggunakan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Jika ketidaksantunan terus ternormalisasi tanpa adanya analisis akademis yang memadai, maka kualitas ruang publik digital kita akan semakin merosot ke arah toksisitas komunikasi yang destruktif (Damayanti et al., 2022).

Sejauh ini, penelitian mengenai kesantunan berbahasa di media sosial telah banyak dilakukan. Penelitian mengenai kesantunan berbahasa warganet di Instagram telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, salah satunya oleh Amil & Ramdhani, (2023) yang mengkaji prinsip kesantunan pada akun @mastercorbuzier. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa warganet cenderung masih mematuhi prinsip kesantunan, seperti maksim kebijaksanaan dan kedermawanan, terutama saat merespons konten promosi atau aktivitas pribadi figur publik tersebut. Sementara Ila & Rahmawati, (2024) menganalisis strategi kesantunan berbahasa dalam komentar media sosial secara umum dan lintas platform, namun belum mengkaji secara mendalam praktik kesantunan warganet dalam merespons satu isu kebijakan atau usulan sosial tertentu pada satu unggahan spesifik. Selain itu, penelitian oleh Sibuea et al. (2025) juga membahas kesantunan berbahasa warganet pada kolom komentar Twitter tokoh politik dengan fokus pada kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap prinsip kesantunan Leech. Namun, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menganalisis kesantunan berbahasa warganet dalam merespons isu kebijakan publik pada platform Instagram. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun studi kesantunan berbahasa di media sosial telah berkembang, belum terdapat penelitian yang secara khusus dan mendalam menganalisis praktik kesantunan warganet dalam merespons isu kebijakan publik pada platform Instagram dalam konteks satu unggahan yang berfokus pada perdebatan sosial tertentu. Kekosongan inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian ini.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan pada objek dan konteks kajian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada figur publik atau konten hiburan, penelitian ini menganalisis kesantunan berbahasa warganet dalam merespons satu isu

kebijakan sosial yang spesifik, yakni usulan gentengisasi, pada satu unggahan Instagram. Fokus pada satu peristiwa komunikasi yang memicu perdebatan memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan dalam situasi kontroversial. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengklasifikasikan bentuk tindak tutur, tetapi juga menempatkan bahasa sebagai representasi sikap publik terhadap sebuah usulan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian kesantunan berbahasa ke ranah diskursus kebijakan publik di media sosial, sehingga menghadirkan kontribusi baru dalam kajian sosiopragmatik digital.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari upaya untuk memahami bagaimana praktik kesantunan berbahasa warganet terbentuk dalam konteks perdebatan isu kebijakan di media sosial. Secara khusus, penelitian ini mempertanyakan bagaimana bentuk tindak tutur ilokusi yang digunakan warganet ketika menanggapi usulan gentengisasi pada unggahan Instagram Folkative. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa yang muncul dalam komentar tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi maksim kesantunan yang paling dominan dipatuhi maupun dilanggar dalam respons warganet terhadap isu tersebut. Dengan demikian, rumusan masalah ini diarahkan untuk menggambarkan pola kesantunan berbahasa dalam diskursus kebijakan publik di ruang digital.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis bentuk tindak tutur ilokusi yang digunakan warganet dalam merespons usulan gentengisasi pada unggahan Instagram Folkative, mencakup klasifikasi representatif, direktif, ekspresif, dan komisif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa berdasarkan maksim kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kemufakatan, kesederhanaan, dan kesimpatian. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kecenderungan maksim yang paling dominan dipatuhi maupun dilanggar sebagai indikator pola sikap publik dalam merespons isu kebijakan yang bersifat kontroversial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis komentar warganet pada unggahan Instagram Folkative terkait usulan gentengisasi. Data dikaji secara kontekstual melalui teknik simak dan catat untuk mengidentifikasi bentuk tindak tutur serta pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan. Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada teori tindak tutur John Searle dan prinsip kesantunan *Geoffrey Leech* dalam kerangka kajian pragmatik.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian pragmatik, khususnya dalam bidang kesantunan berbahasa di media sosial, dengan menghadirkan analisis pada konteks diskursus kebijakan publik yang bersifat kontroversial. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan studi sosiopragmatik digital, terutama dalam memahami relasi antara tindak tutur, prinsip kesantunan, dan dinamika opini publik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan dalam memahami pola respons masyarakat terhadap suatu usulan melalui representasi bahasa di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya dalam membedakan antara kritik yang argumentatif dan praktik tuturan yang mengarah pada ketidaksantunan dalam ruang komunikasi publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Hakikat Tindak Tutur

Tindak tutur (*speech act*) merupakan konsep utama dalam kajian pragmatik yang menempatkan bahasa sebagai tindakan sosial, bukan sekadar alat penyampai informasi. J. L. Austin menjelaskan bahwa setiap tuturan mengandung tiga dimensi, yaitu *locutionary act* (tindakan mengatakan sesuatu), *illocutionary act* (tindakan melakukan sesuatu melalui ujaran), dan *perlocutionary act* (dampak yang ditimbulkan dari ujaran tersebut). Dengan demikian, bahasa tidak bersifat netral, melainkan selalu mengandung maksud dan tujuan tertentu yang berimplikasi pada tindakan sosial. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Searle (1979) yang mengklasifikasikan tindak tutur ke dalam lima jenis, yaitu representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa setiap tuturan memiliki fungsi ilokusi yang berbeda, mulai dari menyatakan fakta hingga memengaruhi tindakan orang lain, sehingga analisis bahasa tidak dapat dilepaskan dari fungsi komunikatif yang melekat di dalamnya.

Dalam konteks keilmuan di Indonesia, Melani & Utomo, (2022) menegaskan bahwa tindak tutur merupakan aktivitas berbahasa yang mengandung maksud tertentu dan menjadi entitas sentral dalam pragmatik. Hal ini memperkuat pandangan bahwa makna tidak hanya terletak pada bentuk linguistik, tetapi juga pada intensi penutur. Sejalan dengan itu, Dewi & Utomo, (2025) menyatakan bahwa dalam setiap ujaran, penutur tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga melakukan tindakan tertentu melalui bahasa. Lebih lanjut, Rosyada et al. (2026) menjelaskan bahwa keberhasilan tindak tutur sangat bergantung pada hubungan antara maksud penutur dan interpretasi mitra tutur dalam konteks tertentu. Artinya, makna

ujaran di bentuk melalui interaksi antara struktur bahasa dan faktor kontekstual, seperti situasi komunikasi, relasi sosial, serta latar belakang pengetahuan bersama. Dengan demikian, tindak tutur tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga bersifat sosial dan kontekstual.

Dalam perkembangan komunikasi digital, tindak tutur mengalami perluasan fungsi yang signifikan. Interaksi di media sosial menunjukkan bahwa setiap tuturan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai tindakan performatif yang dapat memengaruhi audiens secara luas. Komentar warganet, misalnya, dapat membentuk opini publik, memperkuat solidaritas kelompok, atau bahkan memicu konflik dalam ruang diskursif digital. Karakter media sosial yang terbuka, cepat, dan terdokumentasi (jejak digital) menjadikan setiap ujaran memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dibandingkan komunikasi tatap muka. Oleh karena itu, analisis tindak tutur dalam konteks digital menjadi semakin penting untuk memahami bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk bertindak, memengaruhi, dan membangun realitas sosial dalam masyarakat modern.

Pragmatik dan Komunikasi Digital

Pragmatik merupakan cabang linguistik yang secara khusus mengkaji hubungan antara bahasa dan konteks penggunaannya, sehingga makna suatu tuturan tidak dapat dilepaskan dari situasi komunikasi yang melatarbelakanginya. Levinson (1983) menyatakan bahwa pragmatik berfokus pada bagaimana makna ditafsirkan berdasarkan konteks sosial, relasi antar penutur, serta kondisi situasional yang menyertai proses komunikasi. Dengan demikian, makna tidak bersifat inheren dalam bentuk linguistik semata, melainkan dibangun melalui interaksi antara penutur, mitra tutur, dan lingkungan sosialnya. Sejalan dengan itu, Leech (1983) menegaskan bahwa pragmatik juga mencakup prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan bahasa agar sesuai dengan norma sosial, sehingga tuturan tidak hanya dipahami secara tepat, tetapi juga diterima secara sosial.

Perkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam konteks pragmatik, khususnya melalui hadirnya media sosial sebagai ruang interaksi digital. Castells (2010) menjelaskan bahwa masyarakat modern berkembang menjadi *network society*, di mana arus informasi berlangsung secara cepat, terhubung, dan melampaui batas geografis. Dalam kondisi ini, praktik berbahasa tidak lagi berlangsung dalam ruang terbatas, melainkan dalam ruang publik yang terbuka dan partisipatif. Setiap tuturan yang diproduksi di media sosial berpotensi menjangkau audiens yang luas dan beragam, sehingga maknanya menjadi lebih kompleks dan dinamis. Hal ini menuntut penutur untuk lebih mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas dibandingkan komunikasi tatap muka.

Pertiwi et al. (2024) mengemukakan bahwa ruang publik digital yang ditandai oleh dominasi emosi, opini, dan ekspresi personal dalam komunikasi. Dalam ruang ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai medium untuk membangun identitas, mengekspresikan sikap, serta memengaruhi persepsi publik. Karakter media sosial yang terbuka, cepat, dan terdokumentasi melalui jejak digital menjadikan setiap tuturan memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian pragmatik dalam konteks digital menjadi semakin penting untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam membentuk realitas sosial, sekaligus untuk mengidentifikasi potensi konflik dan pelanggaran norma kesantunan dalam interaksi daring.

Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa merupakan aspek penting dalam komunikasi yang berkaitan erat dengan norma sosial, etika, dan pengelolaan hubungan interpersonal melalui bahasa. Chaer (2010) menyatakan bahwa kesantunan berbahasa dipengaruhi oleh tiga kaidah utama, yaitu formalitas, ketidaktegasan, dan kesekawanan. Ketiga kaidah tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi penutur dalam menyesuaikan penggunaan bahasa dengan situasi sosial dan relasi dengan mitra tutur. Dengan demikian, kesantunan tidak hanya ditentukan oleh pilihan kata yang halus, tetapi juga oleh kemampuan penutur dalam mempertimbangkan konteks sosial, jarak sosial, serta tujuan komunikasi yang ingin dicapai.

Lebih lanjut, Ni'am & Utomo, (2020) menegaskan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan sosial dan memengaruhi orang lain. Pandangan ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa selalu memiliki dimensi sosial yang lebih luas, termasuk dalam membentuk citra diri dan relasi kekuasaan. Sejalan dengan itu, Hymes (1992) melalui konsep *ethnography of communication* menekankan bahwa praktik berbahasa tidak dapat dilepaskan dari norma budaya dan sosial yang melingkupinya. Artinya, kesantunan berbahasa bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam suatu komunitas tutur.

Dalam konteks media sosial, kesantunan berbahasa menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Utomo et al. (2021) menunjukkan bahwa komunikasi berbasis digital cenderung mengurangi kontrol sosial langsung, sehingga meningkatkan kemungkinan munculnya ujaran yang tidak santun. Selain itu, Suler (2004) mengemukakan fenomena *online disinhibition effect*, yaitu kecenderungan individu untuk berbicara lebih bebas, spontan, bahkan agresif di ruang digital dibandingkan dalam interaksi tatap muka. Kondisi ini diperkuat oleh karakter media sosial yang anonim, cepat, dan terbuka, sehingga batas antara ekspresi pribadi dan tanggung jawab sosial menjadi kabur. Oleh karena itu, kesantunan berbahasa dalam media

sosial menjadi isu yang krusial karena tidak hanya memengaruhi kualitas interaksi antar individu, tetapi juga menentukan kesehatan dan keberlanjutan ruang publik digital secara keseluruhan.

Prinsip Kesantunan *Geoffrey Leech*

Analisis kesantunan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori Leech (1983) yang memandang kesantunan sebagai upaya untuk meminimalkan ekspresi yang merugikan orang lain dan memaksimalkan ekspresi yang menguntungkan dalam interaksi sosial. Prinsip ini dikenal sebagai *Politeness Principle* yang melengkapi prinsip kerja sama dalam pragmatik. Secara klasik, Leech mengemukakan enam maksim kesantunan, yaitu: kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, kemufakatan, dan kesimpatian. Keenam maksim ini berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial melalui bahasa.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, penelitian ini mengadopsi pengembangan prinsip kesantunan menjadi sepuluh maksim. Selain enam maksim klasik yang dikemukakan oleh Leech (1983), yaitu kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, kemufakatan, dan kesimpatian, penelitian ini juga menambahkan empat maksim lain, yaitu permintaan maaf, pemberian maaf, perasaan (empati), dan berpendapat. Penambahan ini dilakukan untuk menangkap variasi strategi kesantunan yang lebih kontekstual dalam komunikasi digital, khususnya dalam interaksi warganet yang sering kali melibatkan ekspresi emosional, negosiasi makna, serta perbedaan pandangan terhadap suatu isu. Pengembangan ini didukung oleh kecenderungan penelitian mutakhir dalam kajian sosiopragmatik yang melihat bahwa kesantunan tidak lagi bersifat statis, melainkan adaptif terhadap konteks komunikasi (Prayitno, 2017). Dalam konteks ini, kesantunan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap norma, tetapi juga sebagai strategi komunikasi yang digunakan untuk membangun, mempertahankan, atau bahkan menegosiasikan relasi sosial.

Dengan menggunakan kerangka sepuluh maksim tersebut, analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk pematuhan dan pelanggaran kesantunan dalam komentar warganet. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara lebih komprehensif bagaimana bahasa digunakan sebagai alat ekspresi, kontrol sosial, dan representasi sikap publik terhadap isu usulan gentengisasi di media sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka teoritis pragmatik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena kebahasaan secara kontekstual dengan menafsirkan makna tuturan berdasarkan situasi komunikasi yang melatarbelakanginya. Dalam perspektif kualitatif, bahasa dipandang sebagai praktik sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks, relasi antar partisipan, serta kepentingan yang menyertainya (Sukrin, 2025). Oleh sebab itu, analisis difokuskan pada bagaimana warganet menggunakan bahasa untuk menyatakan sikap, memberikan penilaian, serta merespons isu kebijakan publik di ruang digital.

Sumber data penelitian ini adalah kolom komentar pada unggahan akun Instagram Folkative yang memuat informasi mengenai usulan gentengisasi. Akun tersebut dipilih karena memiliki tingkat interaksi yang tinggi dan audiens yang beragam, sehingga memungkinkan terjadinya pertemuan berbagai latar belakang sosial dan perspektif dalam satu ruang komunikasi. Data penelitian berupa tuturan tertulis warganet dalam bentuk komentar yang relevan dengan isu tersebut. Adapun satuan analisis dalam penelitian ini adalah kalimat atau klausa yang mengandung tindak tutur ilokusi dan indikator kesantunan berbahasa. Data dibatasi pada 100-160 komentar teratas (*top comments*) yang dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan (*likes* dan *replies*), sehingga dianggap merepresentasikan opini publik yang paling dominan. Pengambilan 100-160 komentar teratas dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis. Pertama, jumlah 100-160 data dipilih karena dinilai representatif untuk menggambarkan pola penggunaan bahasa warganet tanpa membuat analisis menjadi terlalu luas dan tidak terkontrol. Dengan jumlah tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi variasi bentuk tuturan secara lebih terfokus dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode simak dan catat. Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi unggahan yang secara eksplisit membahas usulan gentengisasi, kemudian menyimak seluruh komentar yang muncul dalam rentang waktu tertentu setelah unggahan dipublikasikan. Komentar yang relevan didokumentasikan melalui tangkapan layar sebagai bentuk autentikasi data, lalu ditranskripsikan ke dalam format teks untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya, dilakukan seleksi data dengan menetapkan kriteria tertentu, yakni komentar yang berkaitan langsung dengan isu kebijakan, mengandung tindakan komunikatif yang jelas (seperti mendukung, menolak, menyarankan, atau mengkritik), serta tidak berupa spam atau simbol nonlinguistik semata.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode normatif. Metode normatif merupakan teknik analisis data dalam penelitian kesantunan berbahasa yang menggunakan kriteria, kaidah, atau norma prinsip kesantunan yang berlaku sebagai instrumen penentunya (Cahyani & Rokhman, 2017). Metode ini menitikberatkan pada kesesuaian data tuturan dengan parameter teoretis pragmatik serta norma sosial budaya yang hidup di masyarakat. Artinya, peneliti menguji data tuturan warganet secara objektif dengan cara mencocokkannya langsung pada formalisme maksim-maksim kesantunan, guna menilai apakah suatu tindakan tutur dikategorikan santun atau tidak santun.

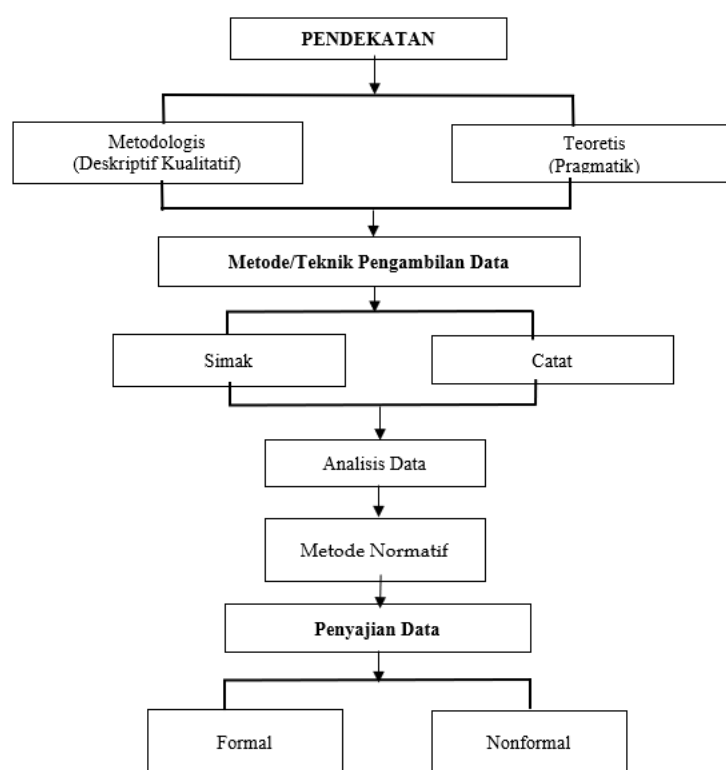
Melalui metode ini, data dianalisis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengevaluasi satuan-satuan bahasa berdasarkan pemenuhan atau pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa. Misalnya, peneliti melihat bagaimana struktur lingual dalam komentar warganet merepresentasikan pematuhan terhadap suatu maksim, atau justru menunjukkan deviasi yang mengarah pada ketidaksantunan akibat daya ilokusinya. Teknik yang digunakan dalam metode normatif ini berfokus pada teknik padan pragmatis, di mana tuturan diukur menggunakan parameter pragmatik seperti sepuluh maksim kesantunan Leech kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, kemufakatan, dan kesimpatian, maksim permintaan maaf, pemberian maaf, perasaan (empati), dan berpendapat. Melalui langkah-langkah tersebut, analisis dapat dilakukan secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti mengungkap bentuk-bentuk pematuhan maupun pelanggaran kesantunan berdasarkan tolok ukur normatif yang muncul dalam data komentar warganet. Dengan demikian, penggunaan metode normatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis dilakukan secara komparatif-normatif, dengan menitikberatkan pada keselarasan pola tutur terhadap kaidah kesantunan bahasa tanpa mengabaikan fungsi komunikatifnya.

Analisis pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan dilakukan dengan merujuk pada teori Geoffrey Leech yang memandang kesantunan sebagai upaya untuk meminimalkan ekspresi yang merugikan orang lain dan memaksimalkan ekspresi yang bermanfaat dalam interaksi sosial (Rustono, 1999). Dalam penelitian ini, prinsip kesantunan yang digunakan tidak hanya mengacu pada enam maksim klasik yang dikemukakan oleh Geoffrey Leech, yaitu kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, kemufakatan, dan kesimpatian, tetapi juga mengadopsi pengembangan teori kesantunan yang lebih mutakhir. Seiring dengan perkembangan konteks komunikasi, khususnya dalam ruang digital, prinsip tersebut diperluas menjadi sepuluh maksim dengan menambahkan empat aspek, yaitu maksim permintaan maaf, pemberian maaf, perasaan (empati), dan berpendapat. Analisis ini bertujuan untuk

mengidentifikasi bentuk kepatuhan maupun pelanggaran yang muncul dalam komentar warganet.

Penyajian data dilakukan menggunakan teknik formal dan informal. Data formal disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan secara informal dijelaskan dengan uraian naratif yang bersifat interpretatif. Tahap selanjutnya adalah identifikasi kecenderungan dominasi maksim, yakni dengan menelaah maksim mana yang paling sering dipatuhi maupun dilanggar dalam keseluruhan data. Proses ini dilakukan melalui pengelompokan dan perbandingan hasil klasifikasi sehingga dapat ditarik simpulan mengenai pola kesantunan berbahasa yang terbentuk dalam dikursus tersebut. Tahap ini secara langsung menjawab rumusan masalah ketiga mengenai maksim kesantunan yang paling dominan.

Keabsahan data dijaga melalui ketekunan pengamatan, yaitu dengan membaca dan menganalisis data secara berulang untuk memastikan konsistensi klasifikasi. Selain itu, penelitian ini menerapkan triangulasi teori dengan memadukan teori tindak tutur dan prinsip kesantunan sebagai kerangka analisis yang saling melengkapi. Jika diperlukan, hasil kategorisasi data juga didiskusikan dengan rekan sejawat untuk meminimalkan subjektivitas penafsiran.



Gambar 1. Bagan Alur Penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dipaparkan hasil dan pembahasan tentang maksim kesantunan berbahasa yang ditemukan pada 100-160 komentar teratas warganet dalam menanggapi Usulan Gentengisasi pada Postingan Instagram @Folkative. Hasil analisis maksim tersebut yaitu Maksim kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, kemufakatan, kesimpatian, permintaan maaf, pemberian maaf, perasaan, dan berpendapat.



Gambar 2. Usulan Gentengisasi pada Postingan Instagram @Folkative.

Tabel 1. Total data Maksim Kesantunan Berbahasa pada komentar warganet dalam menanggapi Usulan Gentengisasi pada Postingan Instagram @Folkative.

Jenis Maksim	Pematuhan	Pelanggaran	Total Data
Maksim Kebijaksanaan (<i>Tact</i>)	5	4	9
Maksim Kedermawanan (<i>Generosity</i>)	2	3	5
Maksim Penghargaan (<i>Approbation</i>)	6	46	52
Maksim Kesederhanaan (<i>Modesty</i>)	7	2	9
Maksim Kemufakatan (<i>Agreement</i>)	24	28	52
Maksim Kesimpatian (<i>Sympathy</i>)	9	5	14
Permintaan Maaf (<i>Obligation of S to O</i>)	1	-	1
Pemberian Maaf (<i>Obligation of O to S</i>)	-	-	-
Maksim Perasaan (<i>Feeling Reticence</i>)	7	3	10
Maksim Berpendapat (<i>Opinion Reticence</i>)	2	3	5
Data Netral (Hanya <i>Tagging/Fatis</i>)	-	-	3
Total			160

Maksim kebijaksanaan

Maksim ini ditunjukkan kepada “pengguna” tindak tutur ini yang nantinya dapat memperkecil kemungkinan kerugian terhadap orang lain dan memaksimalkan “keuntungan” yang didapat orang lain. Pengguna tuturan ini tentunya harus selalu berlandaskan pada mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi dalam kegiatan bertutur (Rahmawati, 2021). Selaras dengan yang dikatakan oleh Yanti et al., (2021) bahwa melalui maksim kebijaksanaan ini nantinya pengguna tuturan dapat berpegang teguh terhadap nilai-

nilai yang selalu mengutamakan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Melalui hal ini, diharapkan para pengguna tuturan mendapat julukan sebagai orang yang santun, karena tuturannya yang dapat patuh terhadap “maksim kebijaksanaan”.

Konteks: Akun @ Opytaufiqismail Memberikan Tanggapan Berupa Komentar Terhadap Postingan Folkative Mengenai Topik “Pak Prabowo Usul Gentengisasi Untuk Ganti Atap Seng Jadi Bahan Tanah Liat”.

Bentuk Pematuhan

“Ada yang bisa bantu jelaskan fungsi tujuan gentengisasi untuk apa?”

Komentar “Ada yg bisa bantu jelaskan fungsi tujuan gentengisasi untuk apa?” oleh akun @ opytaufiqismail dapat dikategorikan sebagai bentuk pematuhan terhadap maksim kebijaksanaan (*tact maxim*), karena menunjukkan upaya penutur untuk meminimalkan kerugian bagi orang lain dan memaksimalkan keuntungan bagi mitra tutur. penutur menunjukkan strategi mitigasi yang kuat melalui penggunaan bentuk interogatif dan frasa permintaan bantuan. Strategi ini berfungsi untuk menurunkan tingkat pemaksaan (*imposition*) terhadap mitra tutur, sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa bentuk permintaan tidak langsung cenderung merepresentasikan tingkat kesantunan yang lebih tinggi karena memberikan ruang bagi mitra tutur untuk merespons tanpa tekanan. Selain itu, penelitian Mahendra et al. (2026) juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap maksim kebijaksanaan ditandai dengan orientasi penutur yang mengutamakan kepentingan orang lain, sebagaimana tercermin dalam data tersebut. Alih-alih menyampaikan kritik atau penilaian secara langsung terhadap isu gentengisasi, penutur memilih strategi bertanya yang bersifat netral dan terbuka. Secara pragmatik, penggunaan frasa “*bisa bantu jelaskan*” mengindikasikan adanya mitigasi dalam bertutur, sehingga permintaan informasi disampaikan dengan cara yang tidak memaksa dan tetap menjaga kenyamanan mitra tutur.

Selain itu, tuturan tersebut mencerminkan orientasi penutur yang lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Penutur menempatkan dirinya sebagai pihak yang membutuhkan penjelasan, bukan sebagai pihak yang menghakimi atau mendominasi percakapan. Strategi ini memperlihatkan kepatuhan terhadap maksim kebijaksanaan karena membuka ruang dialog yang kooperatif dan menghindari potensi konflik. Dalam konteks komunikasi media sosial yang cenderung langsung dan konfrontatif, bentuk tuturan seperti ini menunjukkan praktik kesantunan berbahasa yang relatif tinggi serta mendukung terciptanya interaksi yang lebih konstruktif.

Konteks: Akun @bellshntya memberikan tanggapan berupa komentar personal terhadap postingan folkative mengenai tujuannya untuk menjelaskan orang yang tidak memiliki rumah akan dianggap sebagai orang gembel.

Bentuk Pelanggaran:

“yang ga punya rumah gimana tuh pak? gembelisasi?”

Pada prinsipnya, pelanggaran kesantunan berbahasa terjadi ketika penutur tidak mematuhi maksim kebijaksanaan, yakni tidak berupaya meminimalkan kerugian bagi orang lain serta tidak memaksimalkan keuntungan bagi mitra tutur. Sebaliknya, penutur cenderung mengedepankan kepentingan pribadi dan mengabaikan dampak tuturan terhadap pihak lain. Fenomena ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa pelanggaran prinsip kesantunan sering kali ditandai oleh dominasi ekspresi subjektif penutur tanpa mempertimbangkan dampak sosial tuturan. Dalam konteks media sosial, bentuk pelanggaran seperti ini juga banyak ditemukan dalam studi-studi terdahulu yang mengkaji komentar warganet, seperti penelitian tentang kesantunan dalam kolom komentar Instagram dan Twitter yang menunjukkan kecenderungan meningkatnya ujaran sarkastik dan konfrontatif akibat anonimitas dan jarak sosial digital. Dalam konteks ini, tuturan tidak lagi diarahkan untuk menjaga keharmonisan interaksi, melainkan berpotensi menimbulkan ketegangan, ketidaknyamanan, bahkan konflik dalam komunikasi.

Dari komentar oleh akun @bellshntya diatas tentu termasuk dalam tuturan yang melanggar maksim kebijaksanaan, penggunaan istilah “*gembelisasi*” mengandung nuansa sarkasme dan cenderung merendahkan, sehingga berpotensi merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Alih-alih menyampaikan kritik secara konstruktif, penutur memilih bentuk sindiran yang dapat menyinggung kelompok tertentu, khususnya mereka yang tidak memiliki rumah. Hal ini menunjukkan bahwa penutur tidak mempertimbangkan dampak sosial dari ujarannya dan lebih menonjolkan ekspresi pribadi, sehingga tuturan tersebut melanggar prinsip kesantunan karena tidak meminimalkan kerugian bagi orang lain dalam interaksi.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, kajian ini menghadirkan dimensi analisis yang lebih spesifik dan kontekstual. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada kesantunan berbahasa dalam konteks hiburan, figur publik, atau interaksi umum di media sosial, beberapa studi terdahulu menyoroti bentuk tindak tutur dalam komentar terhadap selebritas atau konten viral, tetapi belum secara mendalam mengaitkan bahasa sebagai refleksi sikap publik terhadap suatu wacana kebijakan. Berbeda dengan itu, penelitian ini secara khusus menempatkan tuturan warganet sebagai representasi

sikap sosial terhadap usulan kebijakan gentengisasi, sehingga analisis pragmatik tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi bentuk kesantunan, tetapi juga untuk membaca kecenderungan opini publik yang tersirat dalam bahasa.

Maksim Kedermawanan

Anugrah & Rahim, (2022) menyatakan bahwa maksim kedermawanan merupakan prinsip kesantunan yang mengarahkan penutur untuk meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi mitra tutur dalam interaksi. Penerapan maksim ini tercermin melalui tuturan yang menunjukkan sikap membantu, menghargai, dan memberi manfaat kepada pihak lain, sehingga menciptakan suasana komunikasi yang santun. Dalam kondisi tersebut, mitra tutur akan merasa dihargai karena penutur tidak menonjolkan kepentingan pribadi, melainkan berorientasi pada kepentingan bersama.

Konteks: Akun @khumaira41 memberikan tanggapan berupa komentar personal terhadap postingan folkative mengenai topik “pak prabowo usul gentengisasi untuk ganti atap seng jadi bahan tanah liat”.

Bentuk Pematuhan:

“Pak desa ku pengrajin genteng, kalo butuh banyak siap nge sub pak”

Komentar oleh akun @khumaira41 tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pematuhan terhadap maksim kedermawanan. Hal ini tampak dari adanya inisiatif penutur untuk menawarkan bantuan yang berpotensi menguntungkan mitra tutur, yakni dengan menyediakan akses kepada pengrajin genteng sebagai sumber daya yang relevan dengan konteks pembicaraan. Penutur tidak menunjukkan sikap memaksakan kehendak, mengkritik, atau merugikan pihak lain, melainkan berkontribusi secara konstruktif melalui pemberian informasi sekaligus kesiapan untuk membantu. Tuturan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengandung tindak tutur komisif berupa kesediaan membantu. Dalam perspektif pragmatik, penutur secara implisit menawarkan sumber daya yang dimilikinya (akses kepada pengrajin genteng) untuk kepentingan mitra tutur, sehingga mencerminkan orientasi altruistik. Selain itu, jika dikaitkan dengan penelitian Yanti et al. (2021) yang menjelaskan bahwa bentuk tuturan seperti ini juga menunjukkan bahwa kesantunan tidak hanya hadir dalam bentuk penghalusan bahasa, tetapi juga dalam kontribusi nyata terhadap kebutuhan komunikasi. Dengan demikian, pematuhan maksim kedermawanan dalam konteks ini tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga sosial, karena berperan dalam membangun interaksi yang produktif dan solutif di ruang digital.

Konteks: Akun @fabianvc_a memberikan tanggapan berupa komentar personal terhadap postingan folkative mengenai topik “pak prabowo usul gentengisasi untuk ganti atap seng jadi bahan tanah liat”.

Bentuk Pelanggaran:

“Komentar “19 juta lapangan kerjanya kapan nih pak?”

Komentar “19 juta lapangan kerjanya kapan nih pak?” oleh akun @fabianvc_a cenderung tidak mematuhi (melanggar) maksim kedermawanan. Dalam tuturan ini, tidak terdapat upaya memberikan keuntungan atau bantuan kepada mitra tutur. Sebaliknya, tuturan berbentuk pertanyaan retorik yang bernuansa menagih janji atau menyindir, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan atau ketidaknyamanan bagi mitra tutur. Selain itu, pilihan leksikal “kapan nih pak?” dalam konteks tersebut memperkuat implikatur kritis, yang mengarah pada fungsi evaluatif atau bahkan satir, bukan pada orientasi kedermawanan. Dengan demikian, tuturan ini lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran maksim kedermawanan, karena tidak menunjukkan sikap memberi atau menguntungkan mitra tutur, melainkan cenderung menuntut dan mengkritisi. Secara pragmatik, tuturan ini memang berbentuk pertanyaan, tetapi mengandung implikatur kritis dan evaluatif yang kuat. Alih-alih memberikan manfaat atau bantuan kepada mitra tutur, penutur justru menempatkan dirinya dalam posisi menuntut dan menguji komitmen pihak yang dituju. Penggunaan frasa “kapan nih pak?” memperkuat nuansa informal sekaligus tekanan, yang dalam konteks tertentu dapat dipahami sebagai bentuk sindiran atau ketidakpuasan. Hal ini menunjukkan bahwa penutur tidak berupaya memaksimalkan keuntungan bagi orang lain, melainkan lebih menonjolkan kepentingan ekspresif pribadi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Jayanti & Subyantoro, (2019) bahwa pelanggaran prinsip kesantunan sering kali ditandai oleh dominasi sikap subjektif penutur tanpa mempertimbangkan dampak sosial tuturan.

Dengan demikian, maksim kedermawanan dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai prinsip linguistik, tetapi juga sebagai indikator bagaimana warganet memposisikan diri dalam dikursus publik apakah sebagai pihak yang berkontribusi secara konstruktif atau sebagai pihak yang cenderung mengkritik tanpa menawarkan solusi.

Maksim Penghargaan

Menurut Rahardi (2005) seseorang dapat dianggap santun apabila dalam tuturannya mampu memberikan apresiasi kepada orang lain. Melalui maksim penghargaan, penutur diharapkan meminimalkan ujaran yang merendahkan serta menghindari bentuk cacian, dan sebaliknya memaksimalkan ekspresi pujian atau penilaian positif terhadap mitra tutur.

Konteks: Akun @bzfarhan902 memberikan tanggapan berupa komentar terhadap postingan folktive mengenai topik "pak prabowo usul gentengisasi untuk ganti atap seng jadi bahan tanah".

Bentuk Pematuhan:

"Program Gentengisasi ini terlihat ambisius tapi punya potensi besar: sekaligus meningkatkan kualitas rumah, membuka lapangan kerja, dan mengurangi limbah industri. Kalau dijalankan dengan baik, bisa jadi model pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tinggal pastikan implementasinya merata dan bahan lokal benar-benar optimal".

Komentar tersebut dari akun @bzfarhan902 dapat dikategorikan sebagai bentuk pematuhan terhadap maksim penghargaan. Terlihat dari dominasi penilaian positif yang diberikan penutur terhadap program yang dibahas, seperti ungkapan "punya potensi besar" serta pemaparan manfaat yang bersifat konstruktif. Penutur secara jelas berupaya mengapresiasi gagasan yang ada dengan menonjolkan nilai guna dan dampak positifnya. Meskipun terdapat bagian yang mengandung saran, yakni "tinggal pastikan implementasinya merata dan bahan lokal benar-benar optimal", unsur tersebut disampaikan secara mitigatif dan tidak bersifat menjatuhkan. Kritik yang muncul justru berfungsi sebagai penguatan terhadap apresiasi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Guntur et al. (2024) yang menyatakan bahwa maksim penghargaan di media sosial sering kali diwujudkan melalui teknik mitigasi kritik. Dalam hal ini, meskipun @bzfarhan902 memberikan saran terkait implementasi, penggunaan diksi yang halus memastikan bahwa fungsi utama tuturan tetaplah sebagai bentuk apresiasi, selaras dengan prinsip memaksimalkan rasa hormat kepada lawan tutur."

Konteks: Akun @okinumoto memberikan tanggapan berupa komentar personal terhadap postingan folktive mengenai topik "pak prabowo usul gentengisasi untuk ganti atap seng jadi bahan tanah".

Bentuk Pelanggaran:

"Sekelas presiden ngurusin hal receh seperti ini. Wow"

Berdasarkan komentar yang ditulis oleh akun @okinumoto_ dapat disimpulkan bahwa komentar tersebut melanggar maksim penghargaan. Mengacu pada pandangan Rahardi (2005) maksim penghargaan menuntut penutur untuk meminimalkan ekspresi yang merendahkan dan memaksimalkan penghormatan kepada mitra tutur. Dalam kasus ini, prinsip tersebut justru dilanggar secara sistematis melalui pilihan leksikal dan gaya retorik yang digunakan penutur. Hal ini terlihat dari kecenderungan penutur untuk memaksimalkan penilaian negatif terhadap

mitra tutur, alih-alih memberikan apresiasi. Penggunaan frasa “hal receh” mengandung implikatur merendahkan, sedangkan ungkapan “sekelas president” disampaikan secara ironis untuk menegaskan ketidaksesuaian antara status mitra tutur dan tindakan yang dilakukan. Tuturan ini tidak menunjukkan upaya meminimalkan celaan, melainkan justru memperkuat kesan sindiran yang bersifat merendahkan. Dengan demikian, tuturan tersebut tidak mencapai prinsip kesantunan berbahasa sebagaimana diharapkan dalam maksim penghargaan, karena tidak mengandung unsur penghormatan atau penilaian positif terhadap mitra tutur.

Maksim Kesederhanaan

Menurut Mahendra et al. (2026) melalui maksim kesederhanaan ini nantinya pengguna tutur dalam kegiatan bertuturnya dapat bersikap “rendah hati” dengan cara mengurangi pujian yang berlebih terhadap diri sendiri dan menambahkan cacian yang bersifat membangun terhadap diri sendiri agar tercipta adanya kesederhanaan dan kerendahan hati yang dijadikan sebagai parameter dalam menilai “kesantunan” seseorang. Dalam perspektif metode deskriptif kualitatif yang digunakan, temuan ini dapat dipahami sebagai indikasi bahwa orientasi tuturan warganet lebih diarahkan pada evaluasi eksternal (terhadap kebijakan, aktor, atau fenomena) dibandingkan refleksi internal terhadap diri sendiri. Artinya, ruang diskursif yang terbentuk dalam kolom komentar tidak mendorong hadirnya ekspresi kerendahan hati, melainkan didominasi oleh kritik, sindiran, serta opini yang bersifat evaluatif. Sebagian besar penggunaan tuturan justru berupa kritik, sindiran, dan ekspresi evaluatif.

Konteks: Akun @Ditasylfiana Memberikan Tanggapan Berupa Komentar Personal Terhadap Postingan Folkative Mengenai Topik "Pak Prabowo Usul Gentengisasi Untuk Ganti Atap Seng Jadi Bahan Tanah”.

Bentuk Pelanggaran:

“Pak beli di kita aja yaa @ditasylfiana, asli dr pabrik genteng sendiri, bisa di lihat langsung”.

Tuturan tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap maksim kesederhanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh (Rahardi, 2005). Dalam kerangka teori Rahardi, maksim kesederhanaan menuntut penutur untuk mengurangi kecenderungan memuji diri sendiri serta menampilkan sikap rendah hati dalam bertutur. Namun, pada tuturan “Pak beli di kita aja yaa... asli dr pabrik genteng sendiri, bisa dilihat langsung”, penutur justru melakukan hal sebaliknya, yakni menonjolkan keunggulan diri secara eksplisit tanpa adanya upaya mitigasi. Alih-alih menjaga kerendahan hati, penutur justru mengedepankan klaim keaslian produk dan akses langsung ke pabrik sebagai nilai unggul. Strategi ini memperlihatkan orientasi pada peninggian diri (*self-enhancement*), bukan pada sikap merendah sebagaimana yang diharapkan dalam

prinsip kesederhanaan. Selain itu, bentuk ajakan yang langsung “beli di kita aja” memberi kesan persuasif yang kuat sekaligus mempertegas posisi penutur sebagai pihak yang ingin diutamakan. Dalam konteks kesantunan, pola seperti ini cenderung mengabaikan keseimbangan antara promosi dan kerendahan hati. Oleh karena itu, tuturan ini tidak mencerminkan maksim kesederhanaan karena lebih menonjolkan kepentingan dan keunggulan diri secara terbuka.

Maksim Kemufakatan

Maksim kemufakatan merupakan salah satu prinsip kesantunan berbahasa yang berfungsi untuk menjaga keselarasan hubungan sosial melalui terciptanya kesesuaian pandangan antara penutur dan mitra tutur. Maksim ini menuntut penutur untuk mengedepankan sikap setuju, mendukung, atau setidaknya tidak secara langsung menentang pendapat lawan tutur dalam proses interaksi. Dengan demikian, komunikasi yang terjalin tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga tetap mempertahankan keharmonisan sosial. Menurut Febriasari & Wijayanti (2018) dalam tradisi tutur masyarakat Jawa, tindakan memotong pembicaraan atau menyanggah secara langsung dianggap kurang santun karena berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan interpersonal. Sejalan dengan itu menurut Wulandari & Utomo (2021), dalam praktik tindak tutur, penutur cenderung menggunakan strategi kebahasaan yang mempertimbangkan hubungan sosial agar interaksi tetap berjalan secara harmonis. Oleh sebab itu, penutur cenderung menggunakan strategi kebahasaan yang lebih halus, seperti menyatakan persetujuan atau memberikan tanggapan yang bersifat mengakomodasi pendapat mitra tutur. Hal ini menegaskan bahwa maksim kemufakatan berorientasi pada upaya memaksimalkan kesepakatan serta meminimalkan ketidaksepahaman dalam aktivitas bertutur.

Konteks: Akun @sahndrra memberikan tanggapan berupa komentar personal terhadap postingan folktive mengenai topik "pak prabowo usul gentengisasi untuk ganti atap seng jadi bahan tanah".

Bentuk pematuhan:

“Setuju, biar produsen genteng dari tanah liat yang asalnya dari pelosok desa tetap bisa menghidupi keluarga.”

Komentar oleh akun @sahndrra tersebut mencerminkan pematuhan terhadap maksim kemufakatan karena penutur secara jelas menyatakan persetujuan terhadap gagasan yang telah disampaikan sebelumnya. Tuturan “setuju” berfungsi sebagai penanda linguistik yang menunjukkan adanya keselarasan sikap dan pandangan antara penutur dan mitra tutur. Selain itu, penambahan alasan mengenai keberlangsungan hidup produsen genteng dari pelosok desa semakin memperkuat dukungan tersebut, sehingga tidak hanya menunjukkan kesepakatan,

tetapi juga mempertegas solidaritas sosial. Dengan demikian, tuturan tersebut tidak hanya memenuhi prinsip kesantunan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keharmonisan interaksi komunikasi. Pada bentuk pematuhan, komentar “Setuju, biar produsen genteng...” menunjukkan adanya upaya memaksimalkan kesepakatan. Penanda “setuju” menjadi indikator linguistik yang memperlihatkan keselarasan pandangan antara penutur dan mitra tutur. Selain itu, alasan yang ditambahkan memperkuat dukungan sekaligus mencerminkan empati sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Iklimah et al. (2024) bahwa kesantunan dalam konteks budaya tutur Indonesia berorientasi pada harmoni dan solidaritas.

Konteks: Akun @anjar.wibisono.73 memberikan tanggapan berupa komentar personal terhadap postingan folkative mengenai topik "pak prabowo usul gentengisasi untuk ganti atap seng jadi bahan tanah”.

Bentuk Pelanggaran:

“Program Ngawur”

Berbeda dengan komentar sebelumnya, komentar oleh akun @anjar.wibisono.73 ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap maksim kemufakatan. Penutur secara sengaja memaksimalkan ketidakcocokan (*maximize disagreement*) dengan menggunakan diksi "ngawur" yang bersifat menghakimi dan konfrontatif. Penggunaan kata konfrontatif seperti "ngawur" mencerminkan temuan artikel bahwa warganet Indonesia cenderung bertutur tidak santun karena lebih mengedepankan ketidakhormatan dan mengecam lawan tutur daripada memberikan penghargaan atau mitigasi kritik. Sementara itu, temuan ini sejalan dengan penelitian Setiani et al. (2022) mengenai pelanggaran Maksim Kemufakatan (*Agreement Maxim*). Dalam konteks ini, warganet tidak lagi berupaya mencari titik temu atau kesepakatan (*common ground*) dengan kebijakan yang ada, melainkan langsung mengekspresikan ketidaksetujuan secara terbuka dan tajam. Penggunaan diksi 'ngawur' menunjukkan bahwa penutur secara sengaja memaksimalkan ketidaksepakatan (*disagreement*) tanpa adanya upaya mitigasi atau penggunaan strategi kesantunan yang mampu memperhalus pertentangan pendapat. Hal ini mempertegas bahwa dalam interaksi digital yang bersifat konfrontatif, prinsip untuk menjaga harmoni melalui kesepakatan sering kali diabaikan demi menyuarakan kritik yang bersifat menyerang."

Maksim Kesimpatian

Maksim kesimpatian mengharuskan peserta tutur untuk meminimalkan rasa antipati dan memaksimalkan rasa simpati dalam interaksi. Dalam perspektif pragmatik, maksim ini tidak hanya berkaitan dengan ekspresi empati secara eksplisit, tetapi juga dengan bagaimana penutur membangun keterlibatan emosional yang suportif melalui pilihan bahasa. Menurut

Nursita et al. (2022) inti maksim kesimpatian terletak pada penghapusan sikap acuh yang dianggap tidak santun, serta penggantinya dengan bentuk partisipasi emosional yang menunjukkan kepedulian terhadap kondisi mitra tutur atau isu yang dibicarakan.

Konteks: Akun @ahnafeanzs_ memberikan tanggapan berupa komentar terhadap postingan folktive mengenai topik "pak prabowo usul gentengisasi untuk ganti atap seng jadi bahan tanah".

Bentuk Pematuhan:

“Semoga yang kanker karena asbes berkurang, semoga impor seng juga berkurang.”

Tuturan oleh akun @ahnafeanzs_ menunjukkan pematuhan terhadap maksim kesimpatian melalui strategi intensifikasi empati yang terstruktur. Secara kualitatif, penggunaan repetisi “semoga” sebagai bentuk anafora tidak sekadar berfungsi sebagai gaya retorik, melainkan sebagai mekanisme pragmatik untuk memperkuat daya ilokusi tuturan berupa doa atau harapan. Pada tataran ilokusi, pengulangan “semoga” menegaskan orientasi penutur pada masa depan yang lebih baik, sehingga menciptakan nuansa optimisme kolektif. Penutur tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mengonstruksi posisi dirinya sebagai bagian dari komunitas yang memiliki kepedulian bersama. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi tuturan dari sekadar informatif menjadi relasional.

Lebih lanjut, komentar yang diutarakan juga membahas penyakit kanker akibat asbes dan impor seng, yang mengandung dimensi kemanusiaan dan ekonomi sekaligus. Dengan mengaitkan dua isu tersebut dalam satu tuturan, penutur memperluas cakupan empati, tidak hanya pada individu yang terdampak secara kesehatan, tetapi juga pada kondisi struktural yang lebih luas. Secara pragmatik, hal ini memperkuat solidaritas sosial karena penutur membangun kesadaran kolektif, tuturan ini juga berhasil menghilangkan sikap acuh dan menggantinya dengan keterlibatan emosional yang aktif. Sementara itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Rahmah et al. (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan kalimat optatif (harapan) di ruang digital berfungsi sebagai sarana membangun kohesi sosial. Secara lebih luas, tuturan ini dapat dipahami sebagai bentuk *positive politeness*, karena penutur berupaya memvalidasi kekhawatiran publik dan memperkecil jarak sosial melalui ekspresi kepedulian bersama. Dengan demikian, pematuhan maksim kesimpatian dalam data ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga fungsional dalam menciptakan komunikasi yang inklusif dan altruistik.

Konteks: Akun @m.zaqikh memberikan tanggapan berupa komentar personal terhadap postingan folktive mengenai topik "pak prabowo usul gentengisasi untuk ganti atap seng jadi bahan tanah".

Bentuk Pelanggaran:

“Kalo ini bener tapi buat apa, kaya negara udah makmur aja lu gituin, urus utang dulu aja sono”.

Komentar oleh akun @m.zaqikh menunjukkan pelanggaran terhadap maksim kesimpatian melalui kombinasi sikap apatis dan agresi verbal. Tuturan ini mengandung beberapa mekanisme pragmatik yang memperkuat antipati. Dalam komentar terdapat strategi *dismissive* yang kuat melalui klausa “Kalo ini bener tapi...”. Secara struktural, klausa ini tampak mengakui kemungkinan kebenaran suatu informasi, namun secara fungsional justru berperan sebagai negasi semu. Penutur segera membatalkan pengakuan tersebut dengan pertanyaan retorik “buat apa”, yang menunjukkan sikap meremehkan dan menolak relevansi isu yang dibahas. Penggunaan pronomina “lu” dan partikel “sono” menciptakan relasi asimetris yang menempatkan penutur pada posisi superior. Pilihan leksikal ini tidak hanya bersifat informal, tetapi juga mengandung nuansa konfrontatif yang memperbesar jarak sosial. Secara pragmatik, hal ini menunjukkan pergeseran dari komunikasi kooperatif menuju komunikasi yang bersifat dominatif. Kemudian pernyataan “urus utang dulu” berfungsi sebagai bentuk *red herring*, yaitu pengalihan isu yang tidak secara langsung berkaitan dengan topik awal. Strategi ini tidak hanya menghindari substansi pembahasan, tetapi juga berpotensi merendahkan mitra tutur dengan cara menyerang aspek lain yang dianggap lebih lemah. Dalam kerangka kesantunan, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *face-attacking act* karena secara langsung mengancam citra diri mitra tutur.

Jika ditinjau melalui teori Rahardi, tuturan ini tidak hanya menunjukkan sikap acuh, tetapi telah berkembang menjadi antipati aktif. Penutur tidak berupaya membangun empati, melainkan justru menutup kemungkinan keterlibatan emosional dengan cara meremehkan dan mengalihkan pembahasan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari & Assidik, (2024), yang menyatakan bahwa pelanggaran maksim kesimpatian di media sosial sering dipicu oleh sentimen tertentu (politik, ekonomi, atau ideologis) yang mengurangi sensitivitas empatik penutur. Dalam konteks ini, tuturan tidak hanya gagal menunjukkan simpati, tetapi juga secara aktif membangun jarak emosional yang memperkeruh interaksi.

Secara keseluruhan, pelanggaran dalam data ini menunjukkan bahwa ketiadaan empati dalam komunikasi digital tidak berhenti pada sikap acuh, tetapi dapat berkembang menjadi bentuk agresi verbal yang merusak kohesi sosial. Tuturan semacam ini cenderung mengubah ruang diskusi menjadi arena konfrontasi satu arah, sehingga menghambat terciptanya dialog yang sehat dan konstruktif.

Maksim Permintaan Maaf

Pendapat Leech (2014) menjelaskan bahwa maksim pemberian maaf merupakan salah satu prinsip kesantunan yang berfokus pada upaya mitra tutur untuk mengakui dan meminimalkan kesalahan yang dilakukan. Maksim ini bertujuan menjaga keharmonisan hubungan interpersonal antara penutur dan mitra tutur dengan cara memaksimalkan ungkapan permintaan maaf serta meminimalkan dampak negatif dari kesalahan tersebut dalam interaksi. Dengan demikian, penggunaan strategi linguistik berupa permintaan maaf tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan kesalahan, tetapi juga sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi ancaman muka (*face-threatening acts*) dalam komunikasi.

Konteks: Akun @ryowesleyy memberikan tanggapan berupa komentar personal terhadap postingan folktive mengenai topik "pak prabowo usul gentengisasi untuk ganti atap seng jadi bahan tanah.

Bentuk Pematuhan:

"gw kira gentengisasi bikin semua orang jadi ganteng, sorry bacanya sekilas gantengisasi :v".

Dalam tuturan tersebut, penutur secara eksplisit menggunakan kata "sorry" sebagai penanda permintaan maaf setelah menyadari adanya kesalahan dalam proses pembacaan atau interpretasi kata "gentengisasi" yang keliru dipahami menjadi "gantengisasi". Secara pragmatis, penggunaan ungkapan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan kesalahan, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga keharmonisan interaksi di ruang publik digital. Penutur berupaya menghindari potensi kesalahpahaman atau penilaian negatif dari pembaca lain dengan segera melakukan koreksi diri.

Lebih lanjut, fenomena ini menunjukkan bahwa dalam konteks media sosial, kesadaran terhadap "muka" (*face*) tetap menjadi pertimbangan penting, meskipun interaksi bersifat informal. Hal ini sejalan dengan pandangan Geoffrey Leech bahwa maksim pemberian maaf berfungsi untuk meminimalkan dampak negatif dari kesalahan serta menjaga hubungan interpersonal. Dengan demikian, penggunaan kata "sorry" dalam tuturan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi *face-threatening acts*. Temuan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa permintaan maaf dalam komunikasi digital sering digunakan sebagai strategi untuk mempertahankan citra diri dan menghindari konflik terbuka (Syapriani et al., 2025). Namun, berbeda dengan konteks komunikasi formal, penggunaan permintaan maaf dalam data ini cenderung bersifat singkat dan informal, yang menunjukkan adanya adaptasi strategi kesantunan terhadap karakteristik media sosial.

Sementara itu, dalam analisis terhadap komentar pada postingan Instagram Folkative, tidak ditemukan penggunaan maupun pelanggaran maksim pemberian maaf. Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi yang terjadi lebih berorientasi pada penyampaian opini, kritik, dan evaluasi terhadap isu yang dibahas, daripada pada upaya menjaga keharmonisan interpersonal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam konteks komunikasi publik yang bersifat massal, penerapan maksim pemberian maaf menjadi kurang dominan dibandingkan dengan maksim kesantunan lainnya, seperti kebijaksanaan, penghargaan, dan simpati.

Dalam kolom komentar pada postingan Instagram Folkative tidak ditemukan pelanggaran maksim permintaan maaf, melalui karakteristik interaksi komunikasi digital yang berlangsung di ruang publik. Berdasarkan konsep maksim pemberian maaf dari Geoffrey Leech, pelanggaran terhadap maksim ini umumnya terjadi antar penutur tidak mengakui kesalahan atau tidak berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap mitra tutur. Namun, dalam konteks komentar warganet, interaksi yang terjadi cenderung tidak bersifat interpersonal maupun dialogis, melainkan lebih berorientasi pada penyampaian opini, kritik, dan evaluasi terhadap isu tertentu. Hal ini menyebabkan tidak terbentuknya situasi komunikatif yang menuntut tanggung jawab personal atas kesalahan, sehingga peluang terjadinya pelanggaran maksim permintaan maaf menjadi sangat kecil. Selain itu, adanya jarak sosial dan sifat komunikasi yang relatif anonim turut mengurangi dorongan untuk menjaga keharmonisan hubungan interpersonal melalui strategi permintaan maaf.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa komunikasi di media sosial, khususnya pada kolom komentar, lebih didominasi oleh ekspresi pendapat daripada interaksi timbal balik yang bersifat personal. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa struktur komunikasi daring cenderung mengurangi penggunaan strategi kesantunan tradisional, termasuk permintaan maaf, karena tidak adanya kedekatan sosial antarpartisipan. Dengan demikian, ketiadaan pelanggaran maksim permintaan maaf dalam data ini tidak hanya disebabkan oleh absennya kesalahan yang perlu diperbaiki, tetapi juga karena konteks komunikasi digital yang tidak memfasilitasi munculnya praktik kesantunan tersebut secara signifikan.

Maksim Pemberian Maaf

Maksim pemberian maaf menurut Leech (2014) merupakan prinsip kesantunan yang berfokus pada upaya meminimalkan kesalahan serta memaksimalkan ungkapan permintaan maaf guna menjaga hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur. Namun, berdasarkan hasil analisis data terhadap komentar pada postingan Instagram Folkative, tidak ditemukan pematuhan maupun pelanggaran terhadap maksim pemberian maaf.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam konteks komunikasi warganet di media sosial, tidak semua prinsip kesantunan muncul secara dominan. Ketidakhadiran maksim pemberian maaf mengindikasikan bahwa interaksi yang terjadi cenderung tidak bersifat interpersonal atau dialogis, melainkan lebih berorientasi pada penyampaian opini secara individu. Dengan demikian, kebutuhan pragmatis untuk mengakui kesalahan atau menjaga keharmonisan melalui permintaan maaf menjadi minim. Fenomena ini juga berkaitan dengan karakteristik komunikasi di media sosial yang cenderung bersifat terbuka dan tidak selalu melibatkan hubungan sosial yang dekat antar partisipan. Akibatnya, *potensi face-threatening acts* tidak selalu direspons dengan strategi mitigasi seperti permintaan maaf. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dalam komunikasi digital, khususnya di kolom komentar media sosial, penggunaan strategi kesantunan seperti permintaan maaf cenderung rendah karena interaksi lebih didominasi oleh ekspresi opini dan evaluasi (Lailiyah et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa konteks komunikasi sangat memengaruhi muncul atau tidaknya suatu maksim kesantunan dalam praktik berbahasa.

Maksim Perasaan

Maksim perasaan mengarahkan penutur untuk meminimalkan ekspresi rasa tidak senang dan memaksimalkan ekspresi afeksi positif dalam interaksi. Dalam perspektif pragmatik, prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan “apa yang dikatakan”, tetapi juga “bagaimana perasaan itu dikonstruksi secara linguistik” melalui pilihan leksikon. Dengan demikian, bahasa tidak sekadar menjadi alat penyampai informasi, tetapi juga instrumen untuk membangun solidaritas sosial dan keselarasan emosional antar partisipan tutur. Menurut Yustiani et al., (2024) pematuhan terhadap maksim perasaan tercermin dari upaya penutur dalam menekan potensi emosi negatif dan menonjolkan pengalaman afektif yang menyenangkan. Strategi ini berfungsi menciptakan suasana komunikasi yang suportif dan minim konflik, terutama dalam ruang digital yang rentan terhadap interpretasi negatif.

Konteks: Akun xrar_21 memberikan tanggapan berupa komentar personal terhadap postingan folktive mengenai topik "pak prabowo usul gentengisasi untuk ganti atap seng jadi bahan tanah liat".

Bentuk Pematuhan:

“Enak genteng tanah liat. Adem sejuk.”

Komentar oleh akun @xrar_21 merupakan bentuk pematuhan terhadap maksim perasaan karena penutur mengekspresikan emosi positif terhadap objek yang dibicarakan. Penggunaan leksikon seperti “enak”, “adem”, dan “sejuk” menjadi penanda linguistik yang menunjukkan rasa puas dan nyaman. Tuturan ini tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi

juga menghadirkan pengalaman sensorik yang bersifat afektif, sehingga memperlihatkan bagaimana penutur memaksimalkan rasa senang terhadap penggunaan genteng tanah liat. komentar ini juga berfungsi menciptakan keselarasan emosional antara penutur dan mitra tutur. Dengan menonjolkan aspek kenyamanan, penutur secara implisit meminimalkan kemungkinan munculnya persepsi negatif terhadap material tersebut. Hal ini membuat interaksi menjadi lebih suportif dan harmonis, karena penutur mengarahkan fokus pada pengalaman positif yang dapat dirasakan bersama.

Dalam kerangka Yustiani et al. (2024) strategi ini menunjukkan upaya aktif dalam meminimalkan potensi ketidaknyamanan. Penutur secara implisit mengabaikan kemungkinan aspek negatif dari genteng tanah liat (misalnya berat atau perawatan), dan lebih memilih menonjolkan aspek yang memberikan kenyamanan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi utama tuturan bukan sekadar informatif, tetapi juga relasional. Secara pragmatik tuturan ini dapat dikategorikan sebagai *positive politeness strategy*, yaitu strategi yang bertujuan mempererat hubungan sosial dengan menciptakan kesamaan perasaan. Penutur berupaya membangun “ruang aman” emosional di mana mitra tutur merasa tervalidasi dalam preferensi atau pandangannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wuryaningrum (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan leksikon bermuatan emosi positif dalam komunikasi digital berfungsi untuk memperkecil jarak sosial (*social distance*) antarpartisipan. Dengan menghadirkan pengalaman sensorik yang bersifat universal (rasa sejuk dan nyaman), penutur menciptakan keselarasan emosional yang memperkuat kohesi sosial dalam komunitas tutur. Secara keseluruhan, tuturan ini tidak hanya memenuhi maksim perasaan secara struktural, tetapi juga secara fungsional berhasil membangun solidaritas sosial, menjaga keharmonisan interaksi, serta memperkuat keterlibatan emosional antara penutur dan mitra tutur dalam konteks komunikasi digital.

Konteks: Akun @Surfingtheinsta88 Memberikan Tanggapan Berupa Komentar Personal Terhadap Komentar Sebelumnya Oleh Akun @Selimariananaa Yang Menanggapi Bahwa Postingan Folkative Mengenai Topik "Pak Prabowo Usul Gentengisasi Untuk Ganti Atap Seng Jadi Bahan Tanah Liat" Dengan Komentar “*Selain Sawitisasi Beliau Sekarang Jadi Duta Gentengisasi Ya*”.

Bentuk Pelanggaran:

Makanya nonton *full speech* nya, paling cepet membuka lapangan pekerjaan dan biaya paling murah itu lewat tourism, nah genteng seng dan sampah itu merusak estetika negara ini dan kebersihan + panas utk tempat tinggal. Gimana turis mau datang kalo banyak sampah

dan rumah-rumah rakyat yang gentengnya berkarat. Jadi orang itu makanya jangan sempit punya pikiran, cari tahu dulu before joling.

Tuturan yang disampaikan oleh akun @surfingtheinsta88 menunjukkan bentuk pelanggaran ekstrem terhadap maksim perasaan karena penutur secara eksplisit memaksimalkan ekspresi ketidaksenangan dan penilaian negatif terhadap mitra tutur. Berdasarkan data tuturan tersebut, pelanggaran ini dapat dibedah melalui tiga lapisan analisis utama. Penutur sama sekali tidak menggunakan perangkat pelunak (*hedges*) untuk memitigasi serangannya. Penggunaan kalimat imperatif “Makanya nonton *full speech* nya” di awal tuturan berfungsi sebagai klaim otoritas informasi yang absolut. Secara pragmatik, absennya mitigasi ini meningkatkan daya ilokusi tuturan menjadi agresif, di mana penutur memposisikan diri sebagai pihak yang lebih kompeten secara intelektual, sementara pandangan mitra tutur dianggap sebagai produk dari ketidaktahuan.

Penggunaan rangkaian frasa negatif seperti “merusak estetika”, “berkarat”, dan “panas” tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan membentuk konstruksi evaluatif yang menyerang dimensi visual dan fungsional secara sekaligus. Penutur membangun narasi bahwa objek yang dibela atau diasosiasikan dengan mitra tutur adalah sesuatu yang inferior. Akumulasi leksikon ini menghasilkan efek stigmatisasi yang menutup ruang dialog, karena penutur langsung mengategorikan pandangan yang berbeda sebagai faktor penghambat kemajuan negara (estetika dan pariwisata). Puncak pelanggaran maksim perasaan terlihat pada penggunaan frasa “Jadi orang itu makanya jangan sempit punya pikiran”. Secara semantik, kata “sempit” di sini bukan lagi mengkritik substansi argumen, melainkan menyerang kapasitas kognitif mitra tutur secara personal. Hal ini merupakan strategi *face-aggravating act* yang bertujuan merusak citra diri (*positive face*) pihak lain. Sesuai dengan kerangka pemikiran Rahim (2023), tuturan ini gagal total dalam meminimalkan ekspresi ketidaksenangan, karena penutur justru secara sengaja menonjolkan superioritas diri melalui penghinaan terhadap pola pikir mitra tutur.

Secara keseluruhan, pelanggaran maksim perasaan dalam tuturan ini mencerminkan strategi komunikatif yang mengutamakan dominasi identitas dan pemaksaan preferensi pribadi di atas keharmonisan interaksi. Dalam konteks komunikasi digital yang anonim, pola tuturan ini cenderung memperbesar potensi konflik karena penutur lebih memilih melakukan konfrontasi langsung dibandingkan memberikan ruang empati atau penghargaan terhadap perspektif yang berbeda.

Maksim Berpendapat

Maksim berpendapat mengarahkan penutur untuk meminimalkan penonjolan pendapat diri sendiri secara mutlak. Tujuannya adalah untuk melunakkan daya ilokusi dari opini yang disampaikan, terutama ketika terdapat unsur ketidakyakinan atau upaya untuk menghargai perspektif mitra tutur. Strategi ini dilakukan dengan cara "memagari" (*hedging*) pernyataan menggunakan diksi yang menunjukkan derajat kepastian yang rendah. Hal tersebut bukan berarti penutur tidak memiliki dasar argumen, melainkan sebagai strategi kesantunan untuk menghindari kesan otoriter atau menggurui. Pematuhan maksim ini memungkinkan terciptanya ruang dialog yang lebih fleksibel dan minim risiko konfrontasi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Mahendra et al. (2026) yang menekankan pentingnya meminimalkan kerugian bagi orang lain dan memaksimalkan keuntungan bagi orang lain, termasuk keuntungan psikologis berupa penghargaan terhadap pendapat mitra tutur.

Konteks: Akun @brosigma123 memberikan tanggapan berupa komentar personal terhadap postingan folkative mengenai topik "pak prabowo usul gentengisasi untuk ganti atap seng jadi bahan tanah liat".

Bentuk Pematuhan:

“Mending asbes aja yang diganti Pak karena asbes katanya salah satu barang yang di-banned di banyak negara karena berbahaya”.

Komentar oleh akun @bro_sigma123 tersebut merupakan bentuk pematuhan terhadap maksim berpendapat karena penutur menyampaikan gagasan secara tidak langsung dan tidak bersifat memaksakan dan secara fungsional mampu melunakkan kekuatan opini. Hal ini terlihat dari upaya penutur dalam meminimalkan kekuatan pendapatnya melalui penggunaan kata “mending” yang menunjukkan saran, bukan perintah. Dengan demikian, tuturan menjadi lebih lunak dan tetap menghargai posisi mitra tutur. Selain itu, penggunaan kata “katanya” merupakan bentuk *evidentiality hedge*, di mana penutur tidak menempatkan diri sebagai sumber kebenaran utama. Selaras dengan pendapat Ananda & Sukartara, (2025) penggunaan strategi *hedging* dalam artikel penelitian berfungsi sebagai alat retorik bagi penulis untuk menjaga jarak dari klaim yang belum terbukti secara absolut, sekaligus menunjukkan kerendahan hati intelektual. Strategi ini menciptakan jarak epistemik antara penutur dan proposisi yang disampaikan, sehingga mengurangi potensi resistensi dari mitra tutur. Secara pragmatik, hal ini berfungsi sebagai mekanisme mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya *face-threatening act*.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Pradopo (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan penanda dengan derajat kepastian rendah berfungsi sebagai alat mitigasi untuk menjaga keharmonisan interaksi. Dengan tidak mengklaim kebenaran secara mutlak, penutur memberikan ruang dialog yang lebih terbuka dan menghindari posisi dominan dalam percakapan. Oleh karena itu, pematuhan maksim berpendapat dalam data ini tidak hanya tampak pada bentuk linguistik, tetapi juga pada fungsi sosialnya dalam menjaga keseimbangan relasi komunikatif.

Konteks: Akun @haqii_92 memberikan tanggapan berupa komentar personal terhadap postingan folktive mengenai topik "pak prabowo usul gentengisasi untuk ganti atap seng jadi bahan tanah liat".

Bentuk Pelanggaran:

“dikira mungkin selama ini kita beratapkan langit langsung, mau genteng apa juga pa ya namanya genteng ada genteng tanah liat ada genteng metal ada polycarbonate haduh”.

Komentar oleh akun @haqii_92 menunjukkan pelanggaran terhadap maksim berpendapat melalui fenomena yang dapat dikategorikan sebagai *mock politeness* atau kesantunan semu. Meskipun terdapat penanda *hedging* “dikira mungkin” di awal tuturan, secara fungsional unsur tersebut tidak mampu melunakkan daya ilokusi karena diikuti oleh konstruksi tuturan yang bersifat sarkastik. Ungkapan “beratapkan langit langsung” merupakan bentuk hiperbola yang mengandung implikatur ejekan terhadap mitra tutur. Tuturan ini tidak lagi berfungsi sebagai penyampaian opini yang terbuka, melainkan sebagai kritik yang bernuansa merendahkan. Ketidaksesuaian antara bentuk lingual yang tampak ragu dengan fungsi komunikatif yang menyerang menunjukkan adanya inkonsistensi pragmatik, sehingga *hedging* yang digunakan menjadi tidak efektif.

Lebih lanjut, penggunaan interjeksi “haduh” memperkuat dimensi afektif tuturan, yang menunjukkan kejengkelan sekaligus mempertegas sikap dominatif penutur. Dalam konteks ini, penutur tidak berupaya meminimalkan penonjolan pendapat, melainkan justru memperkuat posisi evaluatifnya secara konfrontatif. Fenomena ini mendukung temuan Zai et al. (2026) yang menyatakan bahwa strategi pelunakan yang disertai unsur sarkasme atau emosi justru akan memperkuat kesan konfrontatif dalam interaksi digital. Dengan demikian, meskipun secara struktural terdapat indikasi pematuhan, secara pragmatik tuturan ini tetap melanggar maksim berpendapat karena gagal menjaga keseimbangan antara penyampaian opini dan kesantunan berbahasa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa warganet menggunakan berbagai bentuk tindak tutur ilokusi, seperti representatif, direktif, ekspresif, dan komisif, dalam merespons isu gentengisasi yang terdapat pada unggahan Instagram Folkative. Selain itu, terdapat temuan bahwa prinsip kesantunan berbahasa tidak hanya diikuti, tetapi juga sering dilanggar, khususnya pada maksim penghargaan dan kemufakatan. Komunikasi di media sosial biasanya lebih spontan, lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan, dan cenderung tidak terlalu memperhatikan aturan sopan santun yang biasanya berlaku. Dengan demikian, tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi serta menguraikan contoh-contoh pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan dalam respons yang diberikan oleh warganet telah berhasil tercapai.

Berdasarkan simpulan tersebut, secara praktis disarankan kepada pengguna media sosial dan pengelola platform digital untuk lebih mendorong penggunaan bahasa yang santun guna menciptakan interaksi yang sehat dan konstruktif di ruang publik digital. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian pragmatik, khususnya yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa di media sosial. Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar peneliti berikutnya memperluas objek kajian pada platform atau konteks yang berbeda serta mengombinasikan pendekatan pragmatik dengan pendekatan lain agar diperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Abror, M., & Sukmawati, N. (2025). Kesantunan berbahasa dalam interaksi sosial di Pondok Pesantren Darul Husna Karawang: Perspektif pragmatik. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 5(1), 299–305. <https://doi.org/10.53769/deiktis.v5i1.1382>
- Amil, F. S. N., & Ramdhani, I. S. (2023). Analisis kesantunan berbahasa warganet pada kolom komentar postingan akun Instagram @mastercorbuzier. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 280–286. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4619>
- Ananda, Z. F., & Sukartara, N. (2025). Analisis hedging dan speech function dalam pidato rapat kabinet 100 hari kerja Presiden Prabowo. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(11), 13128–13135. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i11.9482>
- Anugrah, M. A., & Rahim, R. (2022). Kesantunan berbahasa di kalangan remaja Parangloe Kabupaten Gowa. *Jurnal Konsepsi*, 10(4), 330–337.
- Cahyani, D. N., & Rokhman, F. (2017). Kesantunan berbahasa mahasiswa dalam berinteraksi di lingkungan Universitas Tidar: Kajian sosiopragmatik. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 44–52.
- Castells, M. (2010). *End of millennium*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781444323436>
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan berbahasa*. Rineka Cipta.

- Damayanti, M. R., Lina, C. R. S., Saputra, M. S., Sasmita, D., & Hawa, M. (2025). Bahasa, gender, dan kekuasaan: Analisis sosiolinguistik terhadap relasi sosial dalam tuturan. *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran*, 3(2), 385–395.
- Damayanti, V. A., Permatasari, I. O., Zelig, K. B. Y., Pramana, H. R., & Utomo, A. P. Y. (2022). Analisis tindak tutur lokusi pada video pembelajaran di daftar putar "Bahasa" dari channel Pahamify. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 722–738.
- Dewi, A., & Utomo, A. P. Y. (2025). Transformasi ragam tindak tutur direktif dalam interaksi antar tokoh pada novel *Hei, Bodyguard! (A Secret)* karya Diviyaya. *Caraka: Jurnal Ilmu Kebahasaan, Kesastraan, dan Pembelajarannya*, 12(1), 736–764.
- Febriasari, D., & Wijayanti, W. (2018). Kesantunan berbahasa dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 2(1), 140–150. <https://doi.org/10.24176/kredo.v2i1.2557>
- Guntur, G., Rahman, R., & Minura, M. (2024). Hubungan tingkat pendidikan terhadap kesantunan berbahasa Indonesia bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 4(3), 246–259.
- Hanim, A. F., Salama, F., Andika, L. D., Rohmah, U. F., Utomo, A. P. Y., Kesuma, R. G., & Wahyuni, N. I. (2024). Analisis kesalahan dan tanda baca teks berita pada surat kabar *Kompas* edisi Januari 2024 sebagai kelayakan bahan bacaan dan sumber informasi. *Pustaka: Jurnal Bahasa dan Pendidikan*, 4(4), 90–112. <https://doi.org/10.56910/pustaka.v4i4.1726>
- Hastuti, T. M., Ningrum, A. A., Viani, T. R., Chairunnisa, S. Y., Asyam, M. S., Utomo, A. P. Y., & Rujiani, R. (2024). Analisis kesalahan berbahasa pada cerpen yang berjudul *Badai yang Reda* dan *Hutan Merah* karya Fauzia sebagai kelayakan bahan ajar membaca intensif mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya*, 3(2), 9–33. <https://doi.org/10.55606/protasis.v3i2.161>
- Hidayah, S. H. (2024). Tindak tutur dan kesopanan dalam komunikasi interpersonal: Kajian pragmatik. *Widyantara*, 2(2), 193–202. <https://doi.org/10.63629/widyantara.v2i2.145>
- Hymes, D. (1992). The concept of communicative competence revisited. *Thirty Years of Linguistic Evolution*, 1(2), 31–57. <https://doi.org/10.1075/z.61.08hym>
- Iklimah, N. J., Hakiki, F. S., Rahma, D. F., Ivani, A., Utomo, A. P. Y., Nugroho, A. E., & Maharani, A. T. (2024). Analisis tindak tutur ilokusi dalam video cerita rakyat pada kanal YouTube Dongeng Kita. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(1), 131–154. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i1.298>
- Ila, M., & Rahmiati, R. (2024). Kesantunan berbahasa dalam media sosial: Kajian pragmatik terhadap komentar online. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2(6), 340–349. <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i6.1374>
- Jayanti, M., & Subyantoro, S. (2019). Pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa pada teks di media sosial. *Jurnal Sastra Indonesia*, 8(2), 119–128. <https://doi.org/10.15294/jsi.v8i2.33718>
- Kandam, B. A., Widyadhana, W., Ismiyanti, M., Aziz, I. A., Ardiansyah, R., Susanti, R. F. R., & Utomo, A. P. Y. (2024). Analisis tindak tutur lokusi pada daftar putar video pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kanal Revi Nurmeyani. *Sintaksis: Publikasi*

- Para Ahli Bahasa dan Sastra Inggris*, 2(1), 45–62.
<https://doi.org/10.61132/sintaksis.v2i1.247>
- Lailiyah, N., Setiawan, T., & Mamat, M. (2025). Cyberpragmatics lintas budaya: Perbandingan strategi kesantunan dalam komunikasi digital Indonesia dan Barat pada media sosial. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 120–137.
<https://doi.org/10.19105/ghancaran.vi.21625>
- Leech, G. (2014). *The pragmatics of politeness*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195341386.001.0001>
- Leech, G. N. (1983). Pragmatics, discourse analysis, stylistics and "The celebrated letter."
<https://doi.org/10.1080/01440358308586191>
- Lestari, M. A., & Assidik, G. K. (2024). Pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa warganet pada kolom komentar akun Instagram @aniesbaswedan. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(1), 655–666. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3337>
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511813313>
- Mahendra, Z., Sari, N. P., Muttaqin, R., Rochpriyati, R., Dermawan, D. Y., Ashari, D. T., & Utomo, A. P. Y. (2026a). Kesantunan berbahasa dalam narasi dialog cerita rakyat Jawa Tengah pada kanal YouTube Gromore Studio Series. *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 4(1), 155–191.
- Mahendra, Z., Sari, N. P., Muttaqin, R., Rochpriyati, R., Dermawan, D. Y., Ashari, D. T., & Utomo, A. P. Y. (2026b). Kesantunan berbahasa dalam narasi dialog cerita rakyat Jawa Tengah pada kanal YouTube Gromore Studio Series. *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 4(1), 155–191.
- Melani, M. V., & Utomo, A. P. Y. (2022). Analisis tindak tutur ilokusi akun Baksosapi.gapakemicin dalam unggahan di Instagram: Suatu analisis pragmatik. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(2), 250–259.
<https://doi.org/10.19105/ghancaran.v3i2.3528>
- Ni'am, S. T. F., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa pada kegiatan praktik debat siswa kelas X SMA Negeri 1 Pecangaan. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 9(2), 116–122.
- Nursita, S., Amala, R. N., & Utomo, A. P. Y. (2022). Analisis prinsip kesantunan dalam dialog narasi *Mata Najwa* episode *Coba-Coba Tatap Muka*. *Jurnal Ilmiah Semantika*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.46772/semantika.v3i02.580>
- Pertiwi, A. B., Idmania, D., Pradana, O. S., Gustami, R. C. M., Syafa, S. Z., Utomo, A. P. Y., & Ripai, A. (2024). Analisis kesalahan berbahasa pada teks berita dalam platform digital *Kompas* edisi Desember 2023 sebagai alternatif membaca kritis siswa kelas IX SMP. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan Bahasa*, 1(4), 84–105.
<https://doi.org/10.62383/dilan.v1i4.823>
- Pradopo, R. D. (2021). *Stilistika*. UGM Press.
- Pratama, R. K., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis tindak tutur ekspresif dalam wacana *Stand Up Comedy Indonesia* sesi 3 Babe Cabita di *Kompas TV*. *Caraka*, 6(2), 90.
<https://doi.org/10.30738/v6i2.7841>
- Prayitno, H. J. (2017). *Studi sosiopragmatik*. Muhammadiyah University Press.

- Puspitasari, R., Dewi, E. M., Fahonah, A. N. N., Sari, V. W., Maharani, A., Utomo, A. P. Y., & Kesuma, R. G. (2024). Analisis tindak tutur lokusi dalam daftar putar *Ruang BK* pada channel YouTube Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI. *Sintaksis: Publikasi Para Ahli Bahasa dan Sastra Inggris*, 2(1), 24–44. <https://doi.org/10.61132/sintaksis.v2i1.246>
- Rahardi, R. K. (2005). *Pragmatik: Kesantunan imperatif bahasa Indonesia*. Erlangga.
- Rahim, A. R. (2023). Kesantunan berbahasa mahasiswa dalam berinteraksi dengan dosen pada media sosial Telegram. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), 4206–4215. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i10.1661>
- Rahmah, L. N., Oktafiani, D., & Arti, S. (2025). Peran bahasa dalam membangun solidaritas komunitas online Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(5), 803–810.
- Rahmawati, N. (2021). Pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan berbahasa percakapan dalam acara *Mata Najwa*. *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 4(1), 46–55. <https://doi.org/10.30998/diskursus.v4i1.9408>
- Rosyada, A., Putri, A. N., Irawati, Y., Al Ghifari, Y. I., Sari, R. R., Utomo, A. P. Y., & Kesuma, R. G. (2026). Tindak tutur ekspresif pada program kompetisi pendidikan *Academy of Champions by Ruangguru*. *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 4(1), 34–61.
- Rustono, H. (1999). *Pokok-pokok pragmatik*. CV IKIP Semarang Press.
- Salsabila, A., & Anshori, I. (2025). Dampak digitalisasi dan media sosial terhadap interaksi sosial di masyarakat. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2), 1873–1880. <https://doi.org/10.54082/jupin.1059>
- Searle, J. R. (1979). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511609213>
- Setiani, H., Mulia, T., & Utomo, A. P. Y. (2022). Kesantunan berbahasa pada video kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia materi teks laporan percobaan SMPN 2 Banjit tahun 2018/2019. *Parafrasa: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajaran*, 4(2).
- Sibuea, P., Mutiara Chairunisa, A., Shahira, F., & Miranti Hajiriah Manurung, D. (2025). Analisis kesantunan berbahasa tokoh politik Indonesia dalam berkomunikasi di jejaring sosial digital. *Aquinas*. <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/Aquinas/index>
- Sukrin, S. (2025). Bahasa sebagai alat kekuasaan: Telaah kontekstual dalam analisis wacana kritis. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 9(2), 471–482. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v9i2.5855>
- Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *Cyberpsychology & Behavior*, 7(3), 321–326. <https://doi.org/10.1089/1094931041291295>
- Syapriani, I., Putriana, D., Aula, R. P., Sembiring, G. S., Aulia, V., Pulungan, S. K. R., & Rosadi, M. (2025). Strategi komunikasi pengguna media sosial dalam mengelola bahasa, etika, dan resistansi sosial di ruang komentar platform digital X (Twitter). *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 360–368.
- Utomo, W. T., Sembada, A. D., & Muharam, R. S. (2021). Kesantunan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia di media sosial: WhatsApp, Facebook, dan Instagram. *Jurnal Eduscience*, 8(1), 39–46. <https://doi.org/10.36987/jes.v8i1.1974>
- Wijayanti, W., & Subekti, N. D. (2018). Kesantunan berbahasa pada judul berita kasus korupsi di media sosial.

- Wulandari, E., & Utomo, A. P. Y. (2021). Analisis tindak tutur representatif dalam video "Trik Cepet Jawab Soal Matematika Bahasa Inggris Versi Jerome!" pada saluran YouTube Jerome Polin. *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(1), 65–70. <https://doi.org/10.15294/jsi.v10i1.45120>
- Wuryaningrum, R. (2021). Komunikasi fatis dalam wacana disruptif. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni*, 1, 48–53.
- Yanti, L. P. F., Suandi, I. N., & Sudiana, I. N. (2021). Analisis kesantunan berbahasa warganet pada kolom komentar berita di media sosial Facebook. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 10(1). https://doi.org/10.23887/jurnal_bahasa.v10i1.405
- Yulianti, Y., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis implikatur percakapan dalam tuturan film *Laskar Pelangi*. *Matapena: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 3(1), 1–14.
- Yustiani, E., Alifa, N., Arti, W., Qolbi, F., Utomo, A. P. Y., Widhiyanto, R., & Abiprayu, K. B. (2024). Analisis kesantunan berbahasa dalam film pendek negosiasi kelas X pada saluran YouTube Cinta Bahasa. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa dan Pendidikan*, 2(2), 33–57. <https://doi.org/10.61132/pragmatik.v2i2.395>
- Zai, P. R. D., Tarigan, M. G., Aprianti, E., & Danin, N. A. (2026). *Pragmatic analysis of sarcasm in TikTok comments on Indonesian political issues*. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(2), 3618–3630. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.14087>